



Penguatan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan

Pelaksanaan acara Kick Off COREMAP-CTI Asian Development Bank (ADB) dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Hotel Ritz Carlton, Nusa Dua, Bali. Sebagai tuan rumah, Sekretaris Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak I Gede Indra Dewa Putra, SE, MM selaku Asisten 1, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Bali memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan kondisi terakhir sektor pariwisata di Provinsi Bali yang cukup terdampak secara signifikan. Sebagai jalan keluarnya, masyarakat memulai usaha dalam pengelolaan sumber daya hasil laut. Nusa Penida sebagai icon pariwisata bahari merasakan tantangan yang cukup berat akibat hilangnya pendapatan dari sektor Pariwisata dan mulai beralih pada usaha budidaya rumput laut. Beberapa kepala keluarga nelayan sudah memulai kembali usaha rumput laut yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo menyampaikan sambutan kunci (keynote Speaker) acara kick off. Potensi Sumber daya Terumbu karang Indonesia dimana dapat ditemukan sebanyak 39% jenis ikan karang yang ada diseluruh dunia; dengan luas karang mencapai 14% dari luas terumbu karang diseluruh dunia serta terdapat 596 jenis karang. Sestama Bappenas RI juga menyampaikan himbuan bahwa perairan di Propinsi Bali dan Propinsi NTB memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya. Himbuan juga disampaikan untuk membangun kolaborasi para pihak untuk mendukung Program COREMAP-CTI sehingga terbangun

pemahaman dan juga kesepahaman bersama dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama tentang program COREMAP-CTI khususnya pendanaan ADB.

Secara resmi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas RI, Arifin Rudiyanto, menyampaikan pidato Pembukaan kick off COREMAP-CTI ADB. Dalam sambutannya mengingatkan kontribusi ekosistem terumbu karang yang sehat sebesar 2,6M USD pertahun untuk Indonesia, data yang diperoleh dari UNEP, tahun 2018. Sehingga program COREMAP-CTI di Indonesia menjadi penting untuk didukung melalui strategi penguatan kelembagaan, pengelolaan berbasis masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum serta penyadaran masyarakat. Sehingga diharapkan program COREMAP-CTI menjadi salah satu pengungkit dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 bagi masyarakat pesisir, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Pemukulan gong oleh Sekretaris Utama Bappenas RI menjadi simbol penanda dimulainya pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI bantuan ADB di lokasi Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Berkenaan mendampingi Sekretaris Utama Bappenas adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas RI, Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL)



Pemukulan gong oleh Sekretaris Utama Bappenas RI menjadi simbol penanda dimulainya pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI bantuan ADB di lokasi Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Bali, Kepala Bappeda Bali serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas RI, Dr. Sri Yanti menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui ICCTF telah dipercaya untuk mengelola Proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui Bank Dunia (World bank) dan Asian Development Bank (ADB).

Program COREMAP-CTI Bantuan ADB yang diimplementasikan pada periode Maret 2020 hingga Desember 2022 dengan total bantuan Proyek adalah USD 5,2 Juta, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan 10% efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Lesser Sunda khususnya di tiga lokasi proyek, yaitu Nusa Penida (Bali), Gili Balu dan Gili Matra (NTB). Dimana melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Pelaksana Proyek, efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) mencapai 80% kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, 80% Kategori Biru untuk Kawasan Gili Matra dan 100% Kategori Hijau untuk Kawasan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu, NTB.



Kanan ke kiri: Sekretaris Utama (Sestama) Bappenas, Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, dan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dalam Kick Off COREMAP-CTI ADB di Bali

Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi



Pada tanggal 24 Maret 2021 telah dilaksanakan Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi secara luring di Hotel Fairmont Jakarta dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Seminar ini bertujuan untuk: (i) Mendapatkan masukan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas terkait dengan perencanaan pembangunan, untuk mendukung pemasukan PNBP sektor perikanan secara berkelanjutan; dan (ii) Penyampaian hasil kajian Bioekonomi Perikanan Udang di Laut Arafura (WPP 718).

Kegiatan ini dibuka oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Hasil kajian Bioekonomi Perikanan Udang di Laut Arafura disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc. Diskusi dimoderatori oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM dengan penanggap yaitu Dr. Purwito Martosubroto, M.Sc dan Dr. Ir. Gellwyn Jusuf, M.Sc.

Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Akademisi, Perwakilan NGO, Perwakilan Komnas Kajiskan, Perwakilan IMFISERN, dan Perwakilan Praktisi/Pakar.



UPDATE MITRA PELAKSANA

YAYASAN TERUMBU KARANG INDONESIA (TERANGI)

a. Pembangunan Infrastruktur Ekowisata Skala Kecil

Hingga periode Kuartal 1 2021, kegiatan utama Yayasan Terangi selaku mitra pelaksana COREMAP - CTI World Bank Paket 1 adalah pembangunan Infrastruktur ekowisata skala kecil dan infrastruktur penunjang pengembangan sektor perikanan. Total ada 5 infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan pada periode ini, 3 infrastruktur sebagai penunjang pengembangan ekowisata dan 2 infrastruktur untuk pengembangan sektor perikanan. Progress pembangunan infrastruktur pada sebagai berikut:

1. Stasiun Pemantauan Pari Manta di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat) progres pembangunan mencapai 85%
2. Stasiun Pemantauan Pari Manta di Pulau Batanta (KKPD Selat Dampier) progres pembangunan mencapai 72%
3. Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat) progres pembangunan mencapai 93%
4. KJA di Arefi Selatan (SKKPD Selat Dampier) progres pembangunan mencapai 78%
5. KJA di Yensawai Timur (KKPD Selat Dampier) progres pembangunan mencapai 78%

Pemenuhan material kayu oleh pihak kontraktor pelaksana pembangunan mengalami kendala, material kayu harus didatangkan dari Sorong karena kayu-kayu yang ada di Waisai asal-usul produk kayunya masih kurang jelas. Hal tersebut berdampak kepada proses pembangunan infrastruktur yang mengalami keterlambatan terutama pada pembangunan Stasiun Pemantauan Pari Manta.



Stasiun Pemantauan Pari Manta (SAP Raja Ampat)



Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat)

YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KONSERVASI ALAM (YAPEKA)

b. Instalasi PLTS di Nusa Manuk, Rote Ndao

Pada periode bulan Februari 2021 pembangunan PLTS di Nusa Manuk, Kabupaten Rote Ndao sudah memasuki tahap akhir dari rangkaian proses pembangunan. Pada tanggal 8 Februari 2021 Yapeka telah melakukan instalasi PLTS bersama dengan tim kontraktor pelaksana dan dibantu oleh masyarakat Nusa Manuk. Pengerjaan instalasi PLTS ini memakan waktu 10 hari, pengerjaan meliputi:

- Survey lokasi penempatan modul dan generator,
- Pemasangan instalasi listrik di setiap rumah warga,
- Pembuatan kerangka Panel Surya,
- Pemasangan instalasi sistem PLTS,
- Penyambungan instalasi listrik di setiap rumah dengan sistem PLTS,
- Monitoring sistem PLTS yang sudah terpasang, dan
- Sosialisasi pengoperasian dan perawatan sistem PLTS.

Instalasi sistem PLTS yang dipasang terbagi menjadi 8 kelompok/cluster, setiap kelompok terdiri dari 3-4 rumah yang akan dialiri oleh satu unit pembangkit dan 2 unit panel surya. Instalasi PLTS di setiap kelompok rumah dialiri oleh pembangkit berkapasitas 2 kW dengan panel surya berkapasitas 700 Wp yang dapat bertahan selama 2 hari (dalam keadaan mendung) dan dapat digunakan untuk menyalakan 2-4 buah lampu, mengisi baterai telepon genggam, dan mengisi baterai senter. Selain itu juga terdapat 1 sistem PLTS berkapasitas 3,2 kW dengan panel surya berkapasitas 2,1 kWp untuk mengaliri listrik rumah usaha produksi perikanan dan rumput laut. Rumah usaha ini merupakan fasilitas bersama bagi seluruh warga nelayan di Nusa Manuk yang akan dilengkapi dengan peralatan produksi untuk pengemasan ikan, rumput laut, pusat pengisian baterai untuk lampu LED dan senter nelayan di Nusa Manuk. Rumah produksi ini diharapkan dapat menjadi pusat untuk mendorong usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat Nusa Manuk.



Instalasi Panel Surya di Nusa Manuk

c. Persiapan Pelatihan Pencegahan *Bycatch*

Dalam rangka persiapan kegiatan pelatihan pencegahan *bycatch*, pada tanggal 24 - 27 Maret 2021 Yapeka melakukan rangkaian persiapan kegiatan yang meliputi:

- Koordinasi dan diskusi rencana teknis kegiatan pelatihan pencegahan *bycatch* dengan BKKPN, Perguruan Tinggi di Kupang (UNDANA) dan Dewan Konservasi Perairan Provinsi (DKPP) NTT;
- Koordinasi dengan Kelompok Nelayan untuk identifikasi calon peserta yang akan dihadirkan sebagai peserta pelatihan;
- Survei lokasi untuk praktik pelatihan pencegahan *bycatch* di Kampung Nelayan.



Suasana Koordinasi dengan Kelompok Nelayan di Tablolong perihal rencana kegiatan pelatihan pencegahan *bycatch*

Sasaran dari pelatihan ini adalah kelompok nelayan di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, potensi risiko kejadian *bycatch* di daerah ini dilaporkan cukup banyak terjadi terutama untuk penyu dan lumba lumba. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa karakteristik perikanan di Desa Tablolong sesuai dengan pelatihan yang akan dilakukan, dimana nelayan di Desa Tablolong menggunakan kapal dengan ukuran 5 - 10 GT dengan ABK berjumlah kurang lebih 12 orang dan menggunakan alat tangkap jaring pukat manual. Hal ini sesuai dengan rencana pelatihan pencegahan *bycatch* yang sasarannya adalah untuk perikanan laut nelayan skala kecil kurang dari 10 GT.

Universitas Nusa Cendana (UNDANA) akan mengikutsertakan beberapa mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kelautan dan Perikanan pada pelatihan tersebut sekaligus akan melakukan monitoring pencegahan *bycatch* pasca pelatihan, UNDANA juga berminat untuk menindakjuti pelatihan dengan melakukan riset lanjutan dan membuat analisis data untuk keperluan riset dan jurnal ilmiah bagi staff dosen sebagai bentuk keberlanjutan proyek COREMAP - CTI World Bank. Sedangkan Universitas Kristen Artha Wacana akan melibatkan mahasiswa setelah pelatihan *bycatch* untuk melakukan *follow-up* pengembangan produk.

YAYASAN REEFCHECK INDONESIA

d. Asistensi Programmatic Monitoring dan Evaluasi Procurement dan Keuangan

Pada tanggal 25-26 Januari, Yayasan Reefcheck Indonesia mengadakan kegiatan asistensi *programmatic monitoring* dan evaluasi *procurement* dan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap keseluruhan proses pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh Reefcheck serta dalam rangka persiapan audit BPK untuk mitra pelaksana COREMAP - CTI World Bank tahun anggaran 2020.

Kegiatan dilakukan secara *one-on-one* antara Reefcheck Indonesia dengan tim procurement ICCTF dengan langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen pengadaan serta dokumen pelengkapannya.



Review dan penyusunan dokumen pengadaan

Dari hasil kegiatan ini ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian antara lain Reefcheck harus melengkapi dokumen pengadaan barang dan jasa terutama pada pemenuhan kinerja dan *deliverable*, baik dari konsultan proyek maupun vendor pengadaan barang dan jasa.

PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR (PKSPL IPB)

e. Internal Workshop Penguatan Tim Platform ICM

Sebagai bagian dari kegiatan paket 4 pada Output 1.1 yaitu Platform Tata Kelola Pengelolaan Pesisir Terpadu, PKSPL menyelenggarakan Internal Workshop Penguatan Tim Platform ICM, yang dilanjutkan dengan Rapat Penyusunan Pelaporan Hasil Kajian pada tanggal 15-16 Januari 2021, bertempat di Bogor.

Dalam kegiatan ini, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB turut hadir dan memberikan materi mengenai platform pengelolaan wilayah pesisir terpadu: isu strategis, peluang, dan tantangan.

Rapat ini dilakukan sebagai diskusi internal pendahuluan dalam penyusunan platform tata Kelola pengelolaan pesisir terpadu yang akan dibahas lebih lanjut dengan pemangku kepentingan kunci, antara lain Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Daerah, dan dinas terkait di lingkungan Provinsi Papua Barat

PLTS ini direncanakan memiliki kapasitas 9,100Wp sebagai sumber energi untuk: kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut, Reverse Osmosis, dan penerangan bagi rumah masyarakat. Rencana pembangunan PLTS ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao dan BKKPN Kupang.

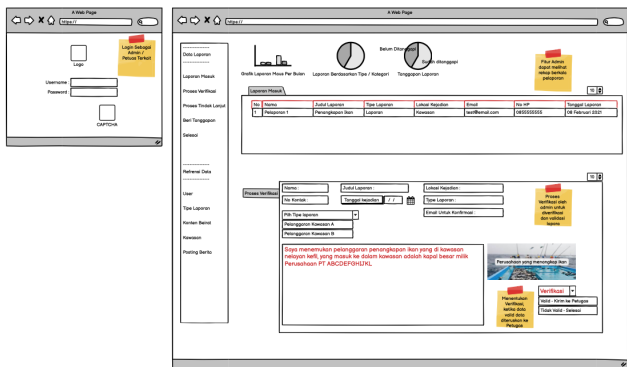


Pemaparan materi pada Internal Workshop oleh Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc

f. Rapat Koordinasi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi RZWP-3-K Papua Barat

Salah satu output dari PKSPL - IPB untuk program COREMAP - CTI World Bank adalah tersedianya aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K Papua Barat. Pada tanggal 16 Februari 2021 PKSPL mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan tim konsultan untuk pengembangan aplikasi tersebut.

Rapat koordinasi tersebut difokuskan untuk menyamakan persepsi terkait sistem informasi monitoring yang akan dibangun, koordinasi penyusunan draft SRS (*software requirement specification*) untuk pembuatan sistem serta mengidentifikasi meta data untuk konten sistem dan pematangan bisnis proses. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat monitoring oleh para pemangku kepentingan di Papua Barat untuk melihat kesesuaian pemanfaatan/penggunaan kawasan dengan RZWP-3-K Papua Barat.



Pemaparan materi pada Internal Workshop oleh Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc



g. Pembentukan Kelompok Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Kritis di Masyarakat

Hasil kajian mendalam penilaian ekosistem kritis yang dilakukan oleh PKSPL IPB pada 14 - 17 November 2020, menyebutkan bahwa Kampung Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara terpilih sebagai lokasi untuk implementasi program Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 9 - 10 Maret 2021 PKSPL IPB mengadakan kegiatan inisiasi pembentukan kelompok konservasi di masyarakat Kampung Yensawai Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

1. Kelompok Pengelola Ekosistem Terumbu Karang Kampung Yensawai, fokus terhadap konservasi dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang;
2. Kelompok Korbon Kampung Yensawai, fokus terhadap konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove;
3. Kelompok Andoi Kampung Yensawai, fokus terhadap konservasi dan rehabilitasi ekosistem lamun.

Anggota kelompok dari masing-masing kelompok tidak hanya berasal dari Kampung Yensawai Barat saja, sebagian juga berasal dari masyarakat Kampung Yensawai Timur. Total jumlah anggota dari ke 3 kelompok tersebut sebanyak 63 orang yang terdiri dari orang dewasa, remaja, pelajar dan dari kalangan ibu-ibu.



Kelompok Pengelola Ekosistem Terumbu Karang Kampung Yensawai

YAYASAN TERUMBU KARANG INDONESIA (TERANGI)

h. Pembangunan Menara Pokmaswas



Menara Pengawas di Meosmanggara, SAP Raja Ampat sudah selesai 100%

Pembangunan Menara Pokmaswas menjadi kegiatan utama yang dilakukan oleh Terangi pada periode Triwulan I 2021. Pada Periode ini dua menara pokmaswas masing-masing di Meosmanggara, SAP Raja Ampat dan Sabu Raijua, TNP Laut sawu progress pembangunannya telah selesai 100%. Sementara Menara POKMASWAS di KKPD Selat Dampier progress bulan Maret berada pada tahap persiapan pembangunan yaitu pengiriman bahan bangunan dari Sorong menuju ke Lokasi Pembangunan di Kampung Sauwandarek dan pembersihan lahan.

Untuk Menara Pengawas di Rote Ndao, TNP Laut Sawu pada bulan Februari sudah ada kunjungan dari Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai syarat penerbitan SPPL.

Pada bulan Februari-Maret dilakukan pembersihan lahan dan pembangunan menara pengawas di Rote Ndao dan Sabu Raijua. Berdasarkan laporan K3L periode Januari 2021, tidak terjadi kecelakaan kerja selama pembangunan infrastruktur tersebut. Hingga saat ini, dapat dikatakan tidak terdapat kendala yang berarti dalam proses pembangunan ketiga menara POKMASWAS tersebut. Rencana pembangunan keempat Menara Pokmaswas lainnya masih dalam tahap persiapan, seperti pengajuan dokumen SPPL dan persiapan lelang kontraktor.



Menara Pengawas di Rote Ndao, TNP Laut Sawu selesai 100 %

i. FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di Kelompok Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat

Sebagai langkah awal untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (Right-Based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM), pada tanggal 8-27 Februari Yayasan PILI mengadakan kegiatan serial FGD pembentukan kelompok masyarakat di KMHA Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat. Kegiatan ini bertujuan untuk menginisiasi pembentukan kelompok masyarakat di KMHA Rote Ndao dan Raja Ampat. Detail serial FGD yang dilakukan sebagai berikut:

- FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di Desa Sotimori, Kabupaten Rote Ndao tanggal 8-10 dan 16-17 Februari 2021
- FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao tanggal 11-13 dan 18-20 Februari 2021
- FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di Kampung Mutus, Kabupaten Raja Ampat tanggal 26-27 Februari 2021

i. Workshop Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Bioekonomi

Hasil dari serial FGD tersebut adalah terbentuknya 11 kelompok masyarakat dengan rincian 4 kelompok di Kampung Mutus, 4 kelompok di Kampung Mutus Timur, 2 kelompok di Desa Oelua dan 1 kelompok di Desa Sotimori. Masing-masing kelompok sudah mempunyai mekanisme kerja kelompok serta sudah mendapatkan SK yang dikeluarkan oleh Desa/Kampung. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak yang akan dilakukan secara partisipatif bersama kelompok-kelompok tersebut.

Kelompok masyarakat ini juga diharapkan akan menjadi motor dalam mengimplementasikan RB-SFM di wilayah masing-masing.



FGD Pembentukan Kelompok di Desa Oelua

RANGKAIAN KICK OFF COREMAP-CTI ADB



Sebagai bagian dari pelaksanaan Kick Off Meeting, diadakan Dialog Interaktif dengan menampilkan tiga nara sumber yaitu Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bali, dan Executive Director Coral Triangle Centre, bersama moderator diskusi adalah Program Manager COREMAP CTI ICCTF. Diskusi dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, Perwakilan Mitra Pelaksana Paket Hibah Program COREMAP CTI bantuan ADB.

Kepala Dinas KP Prov. Bali menyampaikan bahwa penataan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara adat dan budaya serta Agama Hindu Bali, menjadikan panoramanya

Metaksu/Mebhawa-Agung”, sehingga memikat hati wisatawan “ngelangunin”. Dimana pesisir dan laut Bali, dinilai penting secara budaya dan keagamaan serta ekonomi sekaligus merupakan sebagai kawasan suci dan tempat suci. Dipercaya sebagai Kahyangan Jagat, Dhang-Kahyangan, dan lainnya berkaitan dengan Segara Kertih.

Bali memiliki Panjang Garis Pantai 666,35km atau 0,64% dari panjang garis pantai Indonesia, dengan luas perairan Laut: 9,212km². Adapun luas terumbu karang sekitar 7,765Ha, dan mangrove 2,215Ha serta Padang lamun adalah 1,196.5 Ha



Nusa Penida merupakan salah satu lokasi implementasi COREMAP-CTI dengan dana hibah ADB

Kepala Dinas KP Prov Bali menginformasikan 14 kawasan dari 15 kawasan pariwisata di kawasan pantau dan laut Provinsi Bali, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi - 2019. Menjadi wisata tersohor dengan total kunjungan melebihi 10 juta Wisman dan Wisnus untuk Kawasan Wisata termasuk wisata religi. Selanjutnya, Kepala Dinas menyampaikan bahwa selain Wisata Bahari, potensi sumber daya alam laut Bali lainnya adalah sumber daya non konvensional seperti pemanfaatan energi terbarukan dan industri air laut dalam; kemudian perhubungan laut, Industri kelautan melalui pemanfaatan Industri Bioteknologi kelautan serta Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan meliputi Perikanan Tangkap, akuakulture, industri pengolahan dan produk ornamental.

Dalam paparannya, Kepala Dinas KP Prov. Bali menyatakan bahwa dampak Pandemi Covid 19 menjadi momentum untuk membangun kembali sektor kelautan, yang selama ini masyarakat menggeluti sektor pariwisata. Pelaksanaan Quick Wins pengembangan sektor kelautan Bali meliputi usaha perikanan tangkap, perikanan akuakultur, pemanfaatan sumberdaya nonkonvensional dan pengusaha wisata bahari.

Diawal presentasinya Direktur Eksekutif CTC memperkenalkan organisasi CTC sebagai NGO dan bagian dari IUCN dan mitra resmi dari Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Serta telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

CTC berperan aktif dalam pelibatan pembentukan kawasan konservasi perairan daerah melalui sistem zonasi, yang terdiri dari Zona inti, Zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Dalam penyusunan zona perikanan berkelanjutan ditetapkan pula sub-zona perikanan tradisional, sub-zona Pariwisata Bahari Khusus, dan Sub zona Budidaya Rumput Laut. Sementara dalam zona pemanfaatan terdiri dari dua zona, yaitu: sub zona pariwisata bahari dan sub-zona pelabuhan. Untuk zona lainnya, termasuk sub-zona Suci.



Dukungan multi pemangku kepentingan terhadap kawasan konservasi Nusa Penida meliputi survei/pengumpulan data, studi/penelitian, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan pengawasan bersama. Pemangku kepentingan meliputi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Klungkung BPSPL Denpasar, Komunitas LSM Lokal Desa Tradisional, Sektor Swasta, Sukarelawan, Peneliti Akademisi, dan NGO (CTC).

Direktur Eksekutif CTC menyampaikan bahwa intervensi input dan proses selama 18 bulan untuk pelaksanaan Proyek meliputi Input, Proses dan Output. Dimana "Input" meliputi kompetensi SDM dan jumlah, anggaran dan sarana dan prasarana. Kemudian dalam komponen "Proses" meliputi kemitraan, SOP, pelatihan, pengelolaan dan pemeliharaan, pengawasan dan penegakan aturan dan pendampingan masyarakat. Untuk "Output" meliputi persentase tutupan karang/mangrove yang meningkat, populasi spesies target membaik, pelanggaran menurun dan partisipasi masyarakat meningkat.

CTC mengafirmasi keberhasilan pelaksanaan proyek dikarenakan faktor-faktor diantaranya Sintergitas kegiatan proyek dengan indikator kinerja utama (IKU) lembaga dan dinas terkait (Pusat, Provinsi maupun Kabupaten), mekanisme pelaporan dan evaluasi efektivitas kepada lintas kementerian/Lembaga yang terhubung dengan mekanisme pendanaan kawasan. Strategi pengembangan kapasitas personel UPT KKP berjenjang berdasarkan tahapan kawasan konservasi. Memasukkan indikator keberhasilan pengelolaan dan rencana kerja kawasan konservasi dalam RPJMD dan koordinasi komunikasi para pihak.

KUNJUNGAN LOKASI REHABILITASI TERUMBU KARANG INDONESIAN CORAL REEF GARDEN (ICRG) DI NUSA DUA



Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, didampingi perwakilan Coral Triangle Center Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Indonesia Climate Change Trust Fund, dan kelompok nelayan Yasa Segara Bengiat Nusa Dua, melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Indonesia Coral Reef Garden, Nusa Dua pada Selasa, 30 Maret 2021.

Rombongan mendapatkan penjelasan singkat program Indonesia Coral Reef Garden-Pemulihan Ekonomi Nasional (ICRG-PEN) 2020 dan metode Mars Assisted Reef Restoration System (MARRS). Metode MARRS tersebut rencananya akan diadopsi oleh mitra pelaksana COREMAP-CTI ADB untuk merehabilitasi Coral Reefs di Nusa Penida.

Dilanjutkan dengan melihat dari atas kapal lokasi ICRG Blok 6 dan melakukan transplantasi karang pada struktur Reef Star di atas kapal.

Kunjungan ini difasilitasi oleh Nusa Dua Reef Foundation, selaku mitra pemerintah dalam ICRG. Kunjungan lapangan ini merupakan rangkaian kegiatan Kick-off program COREMAP-CTI ADB di Provinsi Bali yang telah dilaksanakan pada hari yang sama di The Ritz Carlton Bali.

Harapannya, rehabilitasi terumbu karang dapat memperbaiki kondisi ekosistem terumbu karang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar terutama mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

PODCAST EPISODE: KONSERVASI LAUT DAN MASYARAKAT ADAT



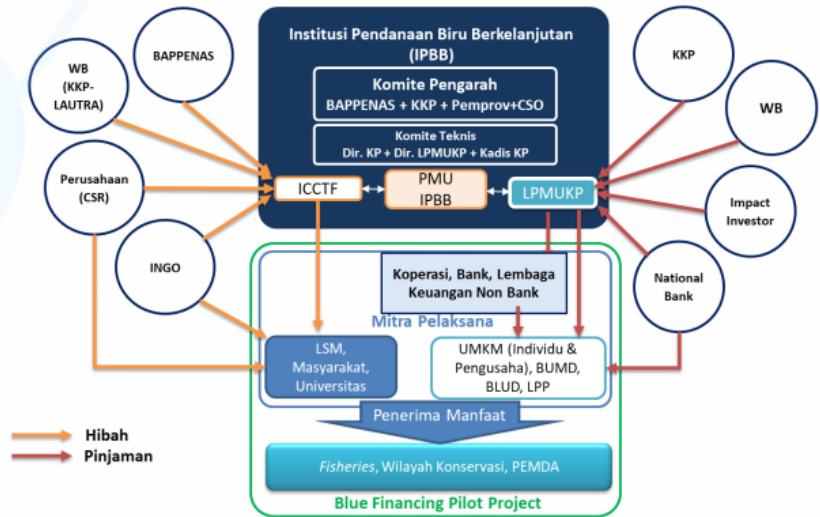
Podcast Cerita dari Laut merupakan ruang berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan ekosistem laut dan pesisir di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program COREMAP-CTI yang dibiayai ICCTF Bappenas.

Pada episode pertama ini, kita akan mendengar pengalaman Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) yang mengulik mengenai program pelestarian terumbu karang atau dikenal dengan Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) di Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat.

INISIASI KERJASAMA TERKAIT SUSTAINABLE BLUE FINANCING DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada Q1 2021, ICCTF telah berdiskusi dan menjajaki rencana kerjasama ini melalui penyusunan SPK yang rencananya akan dilakukan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas dengan salah satu unit teknis di KKP. Muncul beberapa usulan unit teknis KKP yang dapat melakukan kerjasama yaitu: BLU LPMUKP, Biro Perencanaan KKP, Direktorat Pengelolaan Ruang Laut KKP, serta Badan Riset dan Sumber Daya Maritim KKP. Dari beberapa opsi yang ada tersebut, BLU LPMUKP direkomendasikan sebagai unit teknis yang tepat untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan pendanaan inovatif melalui *blue financing* ini. Sampai bulan Maret 2021, ICCTF telah menyusun konsep awal SPK pada akhir Maret 2021 untuk dibahas lebih lanjut secara bersama-sama dengan para pihak. Selanjutnya, akan dilaksanakan pertemuan lanjutan antara ICCTF dengan BLU LPMUKP pada April 2021.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang resmi ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas, dan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu disusun suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara unit teknis di Bappenas dan KKP (Eselon II).

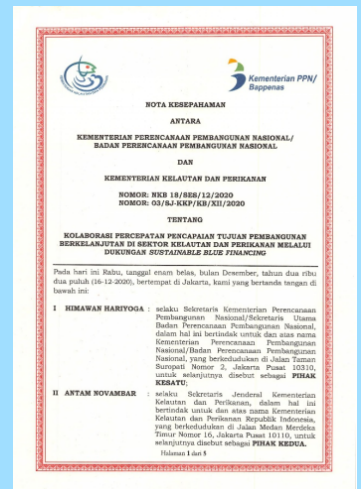


Skema kerja sama ICCTF dan BLU LPMUKP dalam skema Institusi Pendanaan Biru Berkelanjutan

Nota Kesepahaman Bersama ini akan menjadi pintu sekaligus landasan dalam memulai kegiatan-kegiatan pendanaan inovatif di sektor kelautan dan perikanan yang diturunkan dalam SPK yang lebih teknis.

Langkah berikutnya dari SPK tersebut adalah pelaksanaan pilot proyek. Pilot proyek ini diharapkan dapat menjadi percontohan implementasi dan pengarusutamaan pendanaan inovatif di sektor kelautan dan perikanan. Pilot pendanaan inovatif ini akan menggapai sektor dan skala usaha dari berbagai tingkat, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pendanaan inovatif. Pelaksanaan Pilot ini akan mulai diujicoba setelah SPK ditandatangani dan menunggu ketersediaan dana baik dari APBN maupun sumber pendanaan lainnya

Diperkirakan pembahasan pilot proyek ini akan mulai dilakukan pada Q3 2021 mendatang.



Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Kolaborasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan melalui dukungan Sustainable Blue Financing




14 LIFE BELOW WATER

SUPPORTING THE INDONESIAN GOVERNMENT FOR A BETTER CLIMATE



www.icctf.or.id

- Indonesia Climate Change Trust Fund
- ICCTFOfficial
- ICCTF_ID
- ICCTFOfficial

Lippo Kuningan 15th Floor Unit D-E
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12,
 Jakarta 12940, Indonesia
 Phone: (+62 21) 80679386
 (Hunting)
 Fax : (+62 21) 80679387
 Email: secretariat@icctf.or.id